BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Kerjasama Indonesia - Amerika di Bidang Investasi

Indonesia menjalin hubungan politik dan strategis yang cukup baik dengan Amerika Serikat terutama sejak rezim orde baru berkuasa di Indonesia yaitu sejak 1960an. Namun hubungan ekonomi kedua pihak tidak cukup berkembang dibandingkan dengan hubungan ekonomi Amerika Serikat dengan negara tetangga Indonesia, seperti Singapura dan Australia. Dominasi aspek politik dan strategis dalam hubungan kedua negara mengakibatkan Amerika Serikat dan Indonesia kurang mengembangkan potensi-potensi ekonomi diantara keduanya. Sejak tahun 2009 Amerika Serikat juga dilanda krisis ekonomi yang cukup hebat. Upaya peningkatan hubungan kedua belah pihak muncul dalam beberapa tahun terakhir karena dorongan dari kepentingan perekonomian Indonesia dan upaya Amerika Serikat untuk mencari pasar lebih besar dalam rangka pemulihan krisis ekonominya.

Dalam survei *Doing Business 2012* yang dilakukan oleh *International Finance Corporation* (IFC) menempatkan Amerika Serikat sebagai salah satu negara terbaik untuk melakukan usaha. Secara keseluruhan, Amerika Serikat berada di posisi 4 pada 2012. Secara spesifik, Amerika Serikat menempati peringkat 13 untuk kemudahan dalam memulai bisnis, peringkat 17 dalam hal izin konstruksi/pendirian bangunan, posisi 16 untuk registrasi properti, posisi 4 untuk

mendapatkan kredit, peringkat 7 dalam *contract enforcement*, dan peringkat 17 dalam mendapatkan listrik. Peringkat Amerika Serikat tidak terlalu baik dalam hal pembayaran pajak, yakni di posisi 72 dari 183 negara.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara pelopor dari sistem perdagangan internasional modern. Negara ini juga memiliki peranan penting di dalam berbagai organisasi internasional, termasuk yang bergerak di bidang ekonomi dan perdagangan, seperti *World Trade Organization* (WTO). Posisi penting membuat Amerika Serikat memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan arah kebijakan organisasi internasional, yang seringkali dijadikan sebagai acuan bagi negara-negara dalam merumuskan kebijakan (*Doing Bussines 2012*).

Sementara itu stabilitas perekonomi sebuah negara merupakan faktor yang sangat penting untuk menarik negara-negara lain agar tertarik untuk terlibat dalam hubungan ekonomi dengan Indonesia. Sebagai contoh, defisit fiskal secara berkepanjangan dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk merespon siklus bisnis. Angka inflasi yang terlampau tinggi juga bisa membuat perusahaan tidak bisa beroperasi secara efisien.

Dalam bidang investasi, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat menstimulus peningkatan investasi Amerika Serikat di Indonesia dengan tetap mempertimbangkan *cost and benefit* yang diperoleh Indonesia dari investasi tersebut. Pemerintah Indonesia harus dapat memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak dan royalti yang diperoleh dari investasi AS ke Indonesia. Untuk

itu, perlu ditinjau kembali mengenai peraturan pajak dan royalti atas investasi AS di Indonesia.

Pasang surut *Foreign Direct Investment* (FDI) Amerika Serikat ke Indonesia tidak terlepas dari perubahan rezim atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai produk perundang-undangan yang meliberalisasi investasi asing di Indonesia pada tahun 1980an dan tahun 1990an.

Namun krisis yang terjadi akhir tahun 1990an menyebabkan Indonesia tidak menjadi tujuan investasi yang menarik dimata investor asing. Keadaan ini mulai membaik setelah tahun 2001 ketika Pemerintah bersikap lebih terbuka terhadap investasi asing, daya tawar perusahaan-perusahaan Indonesia yang kompetitif, privatisasi dan rekapitalisasi bank-bank di Indonesia, dan privatisasi beberapa BUMN.

Investasi merupakan salah satu komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, investasi diartikan sebagai pengeluaran barang modal yang diarahkan untuk menunjang kegiatan produksi atau perluasan produksi. Ini menjadikan investasi mempunyai *multiplier effect* yang luas karena tidak hanya mendorong sisi produksi, namun juga menstimulasi sisi konsumsi.

Investasi dalam bentuk penciptaan merupakan nilai tambah ekonomi, yang akan mendorong pembukaan dan perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan kemudian pada gilirannya akan menstimulasi konsumsi masyarakat dan kemudian memperdalam pasar domestik. Karena itulah

investasi seringkali dijadikan patokan dalam menilai kualitas pertumbuhan ekonomi.

Dalam kerangka MP3EI (*Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development*), komponen investasi memainkan peran yang sangat strategis karena menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan bidang infrastruktur konektivitas dan kegiatan ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan. Pemerintah mendorong investor untuk melakukan penanaman modal pada koridor-kodidor ekonomi dalam MP3EI melalui berbagai kebijakan pro investasi berupa insentif fiskal, perbaikan layanan perijinan investasi, stabilitas makro ekonomi, dan kepastian serta perlindungan hukum.

Kinerja investasi saat ini menunjukan kearah yang positif yang cukup solid, bahkan di saat perekonomian global mengalami perlambatan, investasi menjelma menjadi salah satu komponen utama penopang pertumbuhan ekonomi menggantikan kinerja ekspor yang cenderung melambat. Data pertumbuhan ekonomi terbaru keluaran Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komponen investasi triwulan III 2012 tumbuh 10,02 % dibanding triwulan yang sama tahun 2011. Bersama dengan komponen konsumsi rumah tangga, keduanya menopang pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6,17 % (www.bps.go.id/brs_file /pdb_05feb13.pdf Diakses 15/05/2013).

Tabel 1 : Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Negara Tahun 2010 – 2012

No	Negara / Country	2010		2011		2012	
		P	I	P	I	P	I
	AMERIKA	234	2.715,0	302	2.018,9	345	2.139,5
1	Amerika Serikat	100	930,9	112	1.487,8	97	1.238,3
2	Argentina	-	-	-	-	-	-
3	Bahamas	2	8,4	3	4,4	2	-
4	Belize	-	-	-	-	1	2,4
5	Bermuda	-	-	1	0,0	-	-
6	Brasil	1	0,1	1	-	1	-
7	British Virgin Island	99	1.615,9	151	517,1	168	855,9
8	Guatemala	-	-	-	-	1	0,5
9	Pulau Cayman	12	11,6	16	7,3	57	29,3
10	Costa Rika	-	-	-	-	-	-
11	Dominika	-	-	-	-	-	-
12	Kanada	15	147,9	12	2,2	14	8,5
13	Meksiko	-	-	1	-	1	-
14	Panama	5	0,2	5	0,1	2	-
15	Puerto Rico	-	-	-	-	1	4,6

Sumber : BKPM P : Jumlah Proyek I : Nilai Investasi dalam US$. Juta

Nilai investasi Amerika Serikat pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan dibandingkan pada tahun 2010 sekalipun perbedaannya tidak begitu jauh dari hasil jumlah proyek akan tetapi nilai investasi di tahun 2011 meningkat dengan total investasi US$ 1.487,8. Sedangkan pada tahun 2012 mengalami penurunan baik dalam total jumlah proyek maupun dari nilai investasi yang dikeluarkan Amerika Serikat terhadap Indonesia.

3.1.1.1 Kerjasama - Kerjasama Investasi yang sudah disepakati antara Indonesia - Amerika Serikat

Kerjasama Investasi yang dilakukan antara Indonesia – Amerika Serikat merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian

kedua negara tersebut. Beberapa ini contoh kerjasama investasi yang sudah disepakati Indonesia dan Amerika Serikat :

Pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman kerjasama investasi untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan kerja sama ini khusus untuk membantu pembangunan infrastruktur yang banyak ditangani dan menjadi kebutuhan industri. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Perindustrian dalam penandatanganan nota kesepahaman itu sementara Pemerintah AS diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri AS Bidang Ekonomi dan Bisnis, Jose W. Fernandez. MS Hidayat. Kerjasama investasi itu untuk membantu pembangunan infrastruktur di 13 sektor dari 22 sektor MP3EI.

Bentuk kerja sama investasi pertama itu adalah proyek bersama PT Pertamina dengan Perusahaan Fuel Technologies Celanese dengan nilai investasi USD 2 miliar untuk Pertamina dalam membuat proyek batu bara dengan Celanese. Amerika Serikat juga akan membantu konsultasi mengenai pembangunan infrastruktur seperti di sektor teknologi informasi (IT), minyak, gas, dan peralatan berat.

Dalam penandatanganan itu, Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Agus Tjahajana. Amerika juga akan memberikan pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia. Wakil Menteri Luar Negeri AS Bidang Ekonomi dan Bisnis Jose W. Fernandez dalam

wawancara mengatakan kerjasama ini merupakan bentuk apresiasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia termasuk penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah dan perusahaan Amerika ingin menjadi mitra dalam pembangunan tersebut, sementara itu Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel mengatakan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, investasi dan lapangan kerja perlu terus ditingkatkan sehingga dapat melanjutkan kemitraan yang sudah terjalin atara Indonesia dan Aemerika. Amerika memiliki tujuan yang sama yaitu pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan lapangan pekerjaan (http://www.jarrakonline.com/detail-2872-mou-indonesiaamerika-pembangunan-infrastruktur.html Diakses 11/05/2013).

PT Chevron Pacific Indonesia, perusahaan minyak dan gas asal Amerika Serikat, akan menerapkan teknologi lanjutan (*Enhance Oil Recovery*/EOR) surfaktan terbesar di dunia di Lapangan Minas, Sumatera. Dalam pertemuan *The 12th Gas Information Exchange in the Western Pasific Area* (GASEX) 2012 di Bali Manager Director Chevron IndoAsia Business Unit, Jeffrey E. Shellebarger saat bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan ini adalah proyek EOR surfaktan terbesar di dunia yang akan dikembangkan dengan total investasi senilai USD 15 miliar dan untuk program *pilot project* Chevron telah menginvestasikan dana sebesar USD 200 juta. Pada pertemuan tersebut, Chevron juga menyatakan komitmennya untuk terus menambah investasi, dan membuka lebih banyak eksplorasi migas di Indonesia. Selain migas, Chevron juga akan terus meningkatkan investasi dalam pengembangan geothermal di Indonesia.

EOR surfaktan ini dilakukan dengan melakukan injeksi surfaktan ke sumur-sumur minyak di Lapangan Minas, Riau. Teknologi tersebut digunakan untuk meningkatkan produksi minyak di lapangan tersebut. Surfaktan merupakan sejenis bahan kimia yang berfungsi seperti sabun yang mengurangi kerekatan minyak pada bebatuan. Injeksi materi ini ke dalam sumur-sumur produksi diharapkan akan mampu mengangkat lebih banyak minyak dari Lapangan Minas (http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/5994-chevron-terapkan-eor-surfaktan-terbesar-di-dunia-di-lapangan-minas.html Diakses 11/05/2013).

Pemerintah Indonesia secara aktif mengembangan gas *unconventional* seperti gas metana batubara. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat menambah cadangan migas, pendapatan negara serta diversifikasi energi sesuai amanat PP No 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional di mana komposisi gas dapat mencapai 30% pada tahun 2025. Demikian dikemukakan Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo dalam acara The 2nd Indonesia - US Energy Investment Roundtable di Hotel Four Seasons, Jakarta.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM dan DPR, sedang melakukan pembahasan serius mengenai program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas. Masalah ini sangat penting karena terkait dengan orang banyak terutama golongan ekonomi lemah. Program konversi juga dapat menekan semakin membengkaknya subsidi BBM.

Pemerintah Indonesia telah berusaha mengadopsi kebijakan yang tepat dan bijaksana untuk mengatasi masalah energi di Indonesia. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan kesempatan untuk memberikan masukan atau

pandangan mengenai gas, termasuk gas unconventional. Pengembangan minyak dan gas unkonvensional menjadi prioritas Pemerintah Indonesia untuk keperluan, meningkatkan kegiatan minyak dan gas eksplorasi, menghadapi kurangnya pasokan gas, mempromosikan diversifikasi energi dan ketergantungan menekan bahan bakar minyak dalam rangka untuk meningkatkan keamanan energi nasional, memberikan energi bersih untuk mengurangi emisi dan memperluas minyak dan ketersediaan gas. Pertemuan ini berlangsung dari tanggal 6-7 februari 2012.

Pertemuan Indonesia - US Energy *Investment Roundtable* merupakan pertemuan yang dibentuk dari hasil kesepakatan pertemuan The 3rd Indonesia - *US Energy Policy* Dialogue yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2010, di Washington, Amerika Serikat dan dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan investasi energi di Indonesia dalam hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Pertemuan Indonesia - US Energy Investment Roundtable pertama telah dilaksanakan pada tanggal 9-10 Mei 2011, di Hotel Grand Melia, Jakarta. Pertemuan itu menghasilkan beberapa kesepakatan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Indonesia maupun Amerika Serikat sebagai upaya peningkatan iklim investasi energi di Indonesia (http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/5434-pengembangan-gas-unconventional-diharap-tingkatkan-cadangan-migas.html Diakses 11/05/2013).

Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati kerja sama untuk mengembangkan sektor infrastruktur industri. Nilai investasi yang akan

ditanamkan Amerika mencapai US$ 5 miliar atau sekitar Rp 47,3 triliun. Investasi ini akan masuk dalam dua tahun mendatang, seusai penandatanganan kerja sama pengembangan infrastruktur prioritas.

Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kementerian Perindustrian bertanggung jawab menangani 13 dari 22 proyek yang masuk dalam skema tersebut. Kerja sama ini bisa meningkatkan kesiapan infrastruktur industri di Indonesia.

Salah satu pihak yang akan menanamkan modal-nya adalah perusahaan kimia *Celanese Corporation of America*. *Celanese* menyepakati kerja sama untuk membuat pabrik pengolahan batu bara senilai USD 2 miliar. Selain itu, perusahaan alat berat *Caterpillar* bakal memperluas usaha dengan investasi senilai Rp 1 triliun di luar Pulau Jawa. Selain mempercepat pertumbuhan infrastruktur nasional, investasi ini bisa mendongkrak ekspor Indonesia ke Amerika.

Dalam kesepakatan ini Menteri Perindustrian yakin Indonesia bisa meraup keuntungan tambahan investasi hingga US$ 3 miliar pada 2014 nanti. Investasi tersebut diharapkan masuk dalam bentuk pembangunan kawasan industri, energi, transportasi, pengelolaan air, serta pengembangan industri ramah lingkungan sehingga dapat merangsang kembali minat investasi perusahaan Amerika di Indonesia.

Dalam kesepakatan ini Wakil Menteri Luar Negeri AS bidang Ekonomi dan Bisnis, Jose Femandez, melihat Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik serta mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.

Amerika Serikat siap menjadi mitra dalam pembangunan di Indonesia. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scott Marciel, Amerika saat ini menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia. Kerjasama investasi ini, selain mampu meningkatkan ketersediaan infrastruktur, juga bisa menambah lapangan kerja di Indonesia. Setelah menanamkan investasi dapat mengundang investor Indonesia untuk menjalankan kegiatan bisnis di Amerika. Dalam Kerja sama ini akan mendorong kesempatan bisnis yang lebih besar untuk Indonesia dan Amerika (http://www.kemenperin.go.id/artikel/4058/Amerika-Tanam-Investasi-Rp-47-Triliun Diakses 11/05/2013).

3.1.2 Perjanjian Kerjasama Comprehensive Partnership Indonesia – Amerika Serikat

3.1.2.1 Sejarah Perjanjian *Comprehensive Partnership*

Comprehensive Partnership adalah merupakan komitmen kerjasama jangka panjang. Dalam pertemuan Presiden Obama dan Yudhoyono menyatakan untuk memperluas, memperdalam dan meningkatkan hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia. Kedua kepala negara ini mengakui pentingnya global ditingkatkan kerjasama antara kedua dan ketiga demokrasi terbesar di dunia, kemungkinan besar untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan, serta pentingnya memupuk pertukaran dan saling pengertian antara dua negara yang paling beragam di dunia.

Presiden Obama dan Presiden Yudhoyono telah membuat kemajuan yang signifikan sejak pekerjaan dimulai pada kemitraan pada pertengahan 2009. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat bersama-sama meluncurkan program

Peace Corps yang akan mempromosikan pengertian antara masyarakat Indonesia dan Amerika. Kedua pemerintah kami menandatangani perjanjian untuk *Sains* dan Teknologi Kerjasama dan *Overseas Private Investment Corporation* (OPIC), yang akan mendukung memperdalam keterlibatan kedua negara kita dalam dua sektor yang paling dinamis dari hubungan kami. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan Kementerian Pertahanan Indonesia menandatangani Pengaturan Kerangka Koperasi Kegiatan di Bidang Pertahanan yang akan meningkatkan kualitas kerjasama keamanan.

Kedua kepala negara telah melihat tingkat belum pernah terjadi sebelumnya konsultasi tingkat tinggi dan menghadapi masalah-masalah bilateral, regional, dan global. Dalam menjalankan Coprehensive Partnership kedua Presiden sepakat untuk memulai inisiatif utama memajukan Pendidikan Tinggi dan menghadapi Perubahan Iklim.

Dalam acara USINDO mendukung upaya dari pemerintah untuk memulai Amerika Serikat - Indonesia *Comprehensive Partnership* yang pertama dalam 60 tahun sejarah hubungan bilateral. Sejak pertama kali diusulkan oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada acara USINDO pada tahun 2008, USINDO telah bekerja untuk mendukung *people to people* dalam aspek kemitraan. USINDO telah mendukung aspek ini dengan melibatkan sektor non-pemerintah dalam pengembangan prioritas kemitraan, kertas pemberitahuan tujuan kemitraan, dan kemajuan kegiatan kemitraan melalui konferensi, forum terbuka, pidato publik, dan delegasi pemimpin pendidikan tinggi

(http://www.whitehouse.gov/the-press-office/us-indonesia-comprehensive partnership Diakses 12/05/2013).

Pada bulan November 2010 pemimpin kedua negara menandatangani US-Indonesia *Compherensive Partnership Agreement* (US-Indonesia CPA) yang merupakan komitmen jangka panjang kedua negara untuk meningkatkan dan memperdalam hubungan bilateral. Salah satu sektor yang menjadi fokus kerja sama adalah sektor ekonomi. Selain menandatangani CPA, upaya Pemerintah Indonesia dan AS untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara ditandai dengan pembentukan beberapa forum untuk memfasilitasi dialog dan kerjasama ekonomi diantara kedua negara. Dalam, hubungan dagang, AS merupakan mitra dagang terbesar ketiga bagi Indonesia setelah Cina dan Jepang. Neraca perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat menunjukkan nilai yang positif.

Pembangunan ekonomi Indonesia sesungguhnya telah banyak mengalami berbagai kemajuan. Masyarakat internasional memberikan apresiasi positif dari perbaikan yang dicapai Indonesia sampai saat ini. Terlihat berbagai ucapan selamat atas kemajuan pembangunan ekonomi Indonesia dan keinginan untuk meningkatkan investasi dari para pengusaha terkemuka dari Amerika pada pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa di Washington DC, USA. Pada pertemuan tersebut disampaikan tentang pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan beberapa hal mengenai hubungan kemitraan Indonesia - Amerika Serikat yaitu:

1. Keinginan untuk memperdalam kemitraan yang komprehensif antara Indonesia dan Amerika di berbagai bidang antara lain: pendidikan, perdagangan, energi, serta lingkungan hidup.
2. Tantangan bagi kedua negara untuk dapat menjaga keberlanjutan kemitraan tanpa memandang siklus politik yang berkembang baik di Indonesia dan Amerika. Jakarta dan Washington DC harus menyadari bahwa kerjasama yang solid akan memberikan manfaat bukan hanya Indonesia dan Amerika, namun juga bagi kawasan dan dunia.
3. Keinginan untuk menjalin kemitraan yang tepat. Hubungan Indonesia – Amerika Serikat tidak hanya menjanjikan, juga kompleks, dan kadang-kadang halus. Untuk mengelolanya, harus menjadi kemitraan yang setara berdasarkan hubungan yang saling menghormati, jujur, dan kerjasama yang seimbang.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Perekonomian mengucapkan terima kasih kepada USINDO *(The United State Indonesia Society)* yang menjembatani dalam kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat melalui pejabat, politisi, pemimpin opini, akademisi, seniman, dan mahasiswa dari kedua negara tersebut (http://www.ekon.go.id/news/2012/09/21/indone sia-amerika-serikat memperkuat-kemitraan-yang-komprehensif 11/05/2013).

3.1.2.2 Tujuan Perjanjian Comprehensive Partnersive

Kerjasama Kemitraan adalah sebagaimana diuraikan dalam Rencana Aksi yang terdiri dari tiga pilar:

1. Pilar Politik dan Keamanan, bekerja sama untuk memperkuat pertahanan bilateral dan kerjasama keamanan melalui Arrangement pada bulan Juni 2010 kami Kerangka Pertahanan dan untuk memerangi non-tradisional tantangan ke daerah keamanan.
2. Pilar Ekonomi dan Pembangunan, mencari perdagangan diperluas dan pengurangan lebih lanjut dari hambatan perdagangan, memperluas kerjasama pembangunan, kolaborasi pada kebijakan energi dan pengembangan energi terbarukan, dan kemajuan tantangan iklim dan lingkungan.
3. Pilar Sosial – Kebudayaan / Pendidikan /Ilmu Pengetahuan dan teknologi, memperluas pertukaran akademis, meluncurkan upaya lima tahun untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang tinggi di Indonesia, memperluas hubungan ilmiah dan penelitian, dan mempromosikan dialog yang akan memajukan perdamaian, toleransi, dan menghormati keragaman. Kemitraan telah mendukung aspek ini dengan melibatkan sektor non-pemerintah dalam pengembangan prioritas kemitraan, kertas pemberitahuan tujuan kemitraan, dan kemajuan kegiatan kemitraan melalui konferensi, forum terbuka, pidato publik, dan delegasi para pemimpin pendidikan tinggi.

Pada saat yang sama, Kemitraan jauh lebih daripada jumlah kelompok kerja dan terdiri memperluas kunjungan tingkat senior, latihan militer, kerjasama lingkungan, pertukaran pendidikan, dan pengembangan hubungan kelembagaan, tidak hanya di tingkat pemerintah, tetapi juga antara sipil, akademisi masyarakat

bisnis, dan. Berdasarkan Kemitraan, kedua pemerintah sedang mengembangkan kebiasaan konsultasi mengenai isu-isu internasional utama, seperti tantangan ekonomi internasional di G-20, perubahan iklim, dan pertanyaan diplomatik. Kami berharap untuk menambahkan tingkat tinggi lainnya dialog seperti yang kita mengembangkan Kemitraan Komprehensif.

Untuk memberikan substansi kepada Indonesia – AS, Kemitraan Komprehensif, dan meskipun kemungkinan mengeksplorasi area lain dari kerjasama, dan mendedikasikan diri untuk memperluas dan memperdalam kerjasama kami pada prioritas berikut:

3.1.2.3 Kerjasama Politik dan Keamanan

1. Untuk memperdalam dan memperluas kerjasama dalam mempromosikan tata pemerintahan yang baik, demokrasi, dan hak asasi manusia, dengan meningkatkan dialog dan pembangunan kapasitas melalui inisiatif bilateral, regional, dan multilateral seperti *Bali Democracy Forum* (BDF);
2. Untuk menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk semua atas dasar kesetaraan, dan untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak tersebut dan kebebasan di semua tingkat masyarakat dan bekerjasama dengan masyarakat internasional sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB dan hak asasi manusia internasional instrumen;

3. Untuk bekerja sama melalui PBB dan bekerjasama dengan instansi terkait seperti ASEAN untuk menemukan kesamaan tentang perlindungan dan promosi hak asasi manusia;
4. Untuk menjadi mitra dalam memelihara perdamaian regional dan internasional dan keamanan di Asia Tenggara dan seterusnya. Untuk memperkuat pendekatan regional dan multilateral dalam mempromosikan perdamaian dan kerja sama internasional, termasuk melalui lembaga-lembaga yang relevan seperti ASEAN, *ASEAN Regional Forum* (ARF), dan PBB;
5. Untuk memperkuat pertahanan bilateral dan kerjasama keamanan melalui dialog dan pembangunan kapasitas yang sesuai dalam bidang-bidang seperti reformasi sektor keamanan, pelatihan, pendidikan, pertukaran personel, pertukaran intelijen, operasi penjaga perdamaian, keamanan maritim, keselamatan nuklir dan keamanan, bantuan kemanusiaan / bencana operasi bantuan, dan peralatan militer, untuk bekerja bersama di bawah kerangka pengaturan dan baru-baru ini ditandatangani antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan;
6. Untuk memperkuat kerjasama dalam mencegah dan memberantas tantangan non-tradisional dalam keamanan regional, termasuk manajemen dan respon bencana, keamanan maritim, kontra-terorisme, penyelundupan migran dan perdagangan manusia, perdagangan narkoba, perdagangan gelap bahan nuklir dan sumber radioaktif,

menular penyakit, korupsi, pencucian uang, *cyber crime* dan kejahatan ekonomi internasional, sumber daya alam kejahatan, penebangan liar dan perdagangan terkait, dan ilegal, penangkapan ikan yang tidak diatur dan tidak dilaporkan, melalui peningkatan kapasitas meningkatkan, manajemen perbatasan, pertukaran informasi dan mekanisme konsultasi bilateral reguler; dan melalui ASEAN dan ARF, serta melalui Pusat Jakarta Kerjasama Penegakan Hukum;

7. Untuk menegaskan kembali peranan ASEAN sebagai penggerak utama dalam mengembangkan kerjasama regional melalui pembentukan Komunitas ASEAN, serta peran penting Amerika Serikat dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara, termasuk melalui aksesi terhadap Perjanjian ASEAN Persahabatan dan Kerjasama, dan melalui upaya untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan Perjanjian di Asia Tenggara Zona Bebas Senjata Nuklir;
8. Untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional melalui kerjasama dalam mencapai perlucutan senjata dan non-proliferasi Senjata Pemusnah Massal, sesuai dengan Perjanjian Non Proliferasi Nuklir, Kimia Konvensi Senjata dan Konvensi Senjata Biologi, serta ratifikasi mengejar *Comprehensive Test Ban Treaty Nuklir*;
9. Untuk meningkatkan kerjasama dalam memperkuat operasi penjaga perdamaian PBB, melalui, antara lain, meningkatkan kapasitas pusat pelatihan penjaga perdamaian di Indonesia, serta mendukung

pembentukan pusat pelatihan polisi penjaga perdamaian. Pusat-pusat di masa depan dapat berfungsi sebagai hub jaringan untuk pusat pelatihan penjaga perdamaian regional;

10. Untuk mempromosikan kerjasama yang erat dalam penegakan hukum dan bantuan hukum, termasuk untuk tujuan pemulihan aset internasional baik dari yurisdiksi masing-masing dari kedua negara atau negara-negara ketiga dalam instrumen hukum internasional yang relevan, untuk terus bekerja menuju perjanjian bilateral bantuan timbal balik hukum;
11. Untuk bekerja sama dalam isu-isu kelautan dan urusan laut melalui pertukaran informasi, dan membangun kemampuan untuk tumpahan bahan berbahaya respon;
12. Untuk mempertahankan upaya menuju reformasi yang efektif dari sistem PBB, dengan tujuan untuk memperkuat multilateralisme dan memperkuat peran PBB dalam memelihara dan mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional.

3.1.2.4 Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

1. Untuk memperluas dan memperdalam kerjasama di tingkat bilateral, regional, dan multilateral untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan kedua negara dan ekonomi dunia;

2. Untuk bekerja sama untuk mendukung upaya bilateral, regional dan multilateral dalam upaya pengentasan kemiskinan termasuk melalui pengaturan teknis tripartit;
3. Untuk bekerja sama dalam mendukung perdagangan internasional yang terbuka, adil, dan transparan berdasarkan peraturan dan sistem keuangan;
4. Untuk meningkatkan kolaborasi dalam badan multilateral dan regional, Organisasi Perdagangan Dunia, *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), G-20 Pemimpin Proses, dan PBB dan dengan ASEAN dalam rangka memenuhi tantangan dan peluang globalisasi melalui perdagangan dan investasi, dan pembangunan berkelanjutan melalui forum multilateral dan regional;
5. Untuk meningkatkan perdagangan bilateral dan investasi melalui *Trade and Investment Framework Agreement* (TIFA), kelompok kerja pada barang-barang pertanian dan industri, jasa, investasi, dan hak kekayaan intelektual, dan kelompok kerja dibuat di bawah Nota Kesepahaman tentang Illegal Logging dan Asosiasi Perdagangan;
6. Untuk meningkatkan perdagangan bilateral melalui fasilitasi perdagangan, pengurangan lebih jauh hambatan perdagangan termasuk hambatan non-tarif, dan stimulasi dialog antara komunitas bisnis kedua negara;
7. Untuk meningkatkan kerjasama investasi bilateral dengan meningkatkan dialog antara otoritas investasi, mengurangi hambatan

terhadap investasi bilateral dan mengambil langkah-langkah lain untuk meningkatkan iklim investasi;

8. Untuk memperluas AS-ASEAN perdagangan dan hubungan investasi dengan mempertahankan keterlibatan dan kemajuan dalam rencana kerja ASEAN-AS *Trade and Investment Framework Agreement* (TIFA);
9. Untuk mempercepat pelaksanaan ASEAN-US *Enhanced* dan Kemitraan melanjutkan bantuan pengembangan kapasitas di bawah Visi Pembangunan ASEAN untuk Meningkatkan Integrasi Ekonomi Program dan ASEAN-AS Bantuan Teknis dan Pelatihan Facilitas, untuk mendukung realisasi ASEAN Community 2015;
10. Untuk meningkatkan kerjasama antara kedua negara dengan mendorong masyarakat bisnis untuk mengembangkan pameran dan misi perdagangan, penanaman modal, pariwisata dan;
11. Untuk mempromosikan perlindungan yang lebih baik dan penegakan hak kekayaan intelektual;
12. Untuk mempromosikan pertanian berkelanjutan, kehutanan, perikanan dan lingkungan dengan menciptakan sebuah proses untuk meningkatkan kerjasama di:
    a) Peningkatan kapasitas termasuk kemampuan sumber daya manusia,
    b) Berbagi penelitian dan teknologi, termasuk makanan dan strategi gizi,
    c) Penerapan teknologi baru termasuk bioteknologi,

d) Peternakan ke jaringan pasar dan diversifikasi produk untuk usaha kecil dan menengah (UKM),
e) Adopsi dan pelaksanaan diakui secara internasional, berbasis ilmu pengetahuan standar makanan dan peraturan yang konsisten dengan janji yang kedua negara merupakan pihak,
f) Ekosistem berbasis pendekatan kepada manajemen, dan
g) Fasilitasi perdagangan;

13. Untuk memperkuat kemitraan untuk memajukan ketahanan pangan yang berkelanjutan melalui peningkatan perdagangan dan inovasi, melalui investasi memelihara dalam produksi pangan, pengolahan, transportasi, pemasaran, dan penelitian-penyuluhan, melalui pengembangan dan penerapan kebijakan ekonomi yang sehat, dan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
14. Untuk bekerja sama pada metode untuk memerangi perdagangan ilegal produk-produk berbasis sumber daya alam;
15. Untuk memperluas dan memperdalam kerja sama pembangunan dan upaya untuk mengatasi tantangan pembangunan.
16. Untuk menegaskan kembali kepentingan bersama kami dalam menjelajahi *Millennium Challenge Account* (MCA) kompak untuk Indonesia sesuai dengan Millenium Challenge Corporation dan prioritas Pemerintah Indonesia, persyaratan dan prosedur dengan tujuan menguntungkan rakyat Indonesia;

17. Untuk memperkuat kerjasama untuk meningkatkan kapasitas usaha kecil dan menengah (UKM) untuk tumbuh, berkembang, dan memiliki akses ke pasar internasional bilateral dan;
18. Untuk mendorong dan mempromosikan pengembangan sektor penerbangan sipil (termasuk infrastruktur), yang mengarah ke kerjasama yang lebih besar dan peluang bagi pertumbuhan ekonomi;
19. Untuk bekerjasama dan berkolaborasi dengan tujuan untuk mengembangkan akses yang sesuai dan mekanisme pembagian keuntungan mengenai sumber daya genetik;
20. Untuk meningkatkan kerjasama media cakupan tujuan wisata masing-masing negara dan sumber daya dan untuk meningkatkan jaringan antara agen-agen perjalanan di kedua negara sebagai alat untuk mengembangkan paket wisata yang menarik;
21. Untuk meningkatkan kerja sama pada pengembangan pariwisata berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat berbasis pariwisata melalui bantuan teknis dalam rangka melestarikan pariwisata ramah lingkungan dan mengentaskan kemiskinan, termasuk dengan menggunakan forum APEC untuk memfasilitasi bidang kerjasama;
22. Untuk meningkatkan kerja sama konservasi hutan, pengelolaan hutan lestari, dan penegakan hukum kehutanan dan tata kelola, melalui dialog kebijakan bilateral, bantuan teknis bilateral, proses antar pemerintah dan lembaga terkait, *Heart of Borneo Initiative*, AS-Indonesia Hutan

Konservasi Tropis perjanjian Undang-Undang, dan kerjasama bilateral lainnya;

23. Untuk memperkuat kerjasama dalam mempromosikan pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut dan pesisir, keanekaragaman hayati mereka, mempromosikan praktek penangkapan ikan yang bertanggung jawab, dan baik budidaya praktek, termasuk melalui kerjasama bilateral dan Inisiatif Segitiga Karang daerah pada Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
24. Untuk bekerja sama untuk meningkatkan pelaksanaan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), konsisten dengan *Bali Road Map*, mengakui perlunya untuk lebih mengoperasionalkan *Accord Kopenhagen* dan terus mengejar tujuan akhir UNFCCC. Untuk memperkuat kerja sama bilateral kami dalam kegiatan iklim terkait, untuk mengembangkan konsultasi dan kerjasama tindakan untuk melestarikan lahan gambut sebagai penyimpanan karbon, untuk mengurangi emisi dari deforestasi, degradasi hutan dengan kemungkinan mendirikan kegiatan demonstrasi REDD+ di Indonesia, dan adaptasi, termasuk penerapan *Manado Ocean Declaration*;
25. Untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama dalam keamanan energi dan untuk mempromosikan pengembangan energi yang berkelanjutan, termasuk sumber-sumber baru dan energi terbaru, efisiensi energi, konservasi energi dan teknologi ditingkatkan. Hal ini

akan dilakukan melalui kerjasama teknis dan teknologi yang mungkin, pengembangan kapasitas dan inisiatif kesadaran publik didukung oleh Indonesia-AS *Energy Policy Dialogue* (EPD);

26. Untuk meningkatkan kerja sama untuk mempromosikan energi nuklir untuk tujuan damai, dalam kerangka Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia Mengenai Penggunaan Damai Energi Nuklir sebagaimana yang telah diubah;
27. Untuk memperkuat kerjasama bilateral dalam pengelolaan lingkungan, termasuk mempromosikan penguatan kerangka lingkungan, pengembangan kapasitas kelembagaan, tata lingkungan dan pemantauan, pendidikan lingkungan, kesadaran dan partisipasi masyarakat, kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas udara dan mengurangi emisi beracun (misalnya merkuri) , dan meningkatkan akses dan kualitas sumber daya air, termasuk melalui pengembangan DAS berbasis rencana pengelolaan sumber daya air; mengurangi emisi metana melalui Methane ke Pasar Kemitraan, dan mempromosikan pembangunan tahan iklim dan upaya pengurangan risiko.

3.1.2.5 Sosial-budaya, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Kerjasama lainnya

1. Untuk meningkatkan kerjasama dalam perlindungan sosial, jaminan sosial, transfer tunai bersyarat, dan bantuan sosial (untuk keluarga, anak-anak, bencana alam dan sosial, cacat, rentan);

2. Untuk bekerja sama untuk mendorong pemahaman yang lebih baik dari orang-orang dari agama yang berbeda dengan mempromosikan dialog antar-agama dan global antar-media dialog yang akan memajukan perdamaian, toleransi dan penghormatan terhadap keragaman agama, etnis dan budaya melalui seminar atau dialog yang melibatkan pemimpin agama dan masyarakat sipil, akademisi dan media orang, dalam rangka untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik dari orang-orang dari agama yang berbeda;
3. Untuk meningkatkan kerjasama dalam mendorong dialog antarbudaya dan antar daerah dialog media untuk meningkatkan rasa hormat dan toleransi untuk kearifan lokal, nilai-nilai sosial yang beragam dan budaya tradisional dan adat, termasuk dengan pembentukan Pusat Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat dan sebaliknya, dan bersama-sama dengan menyelenggarakan konferensi, simposium atau lokakarya yang melibatkan para pemimpin lokal informal, pemimpin tradisi, akademisi, dan ahli dalam rangka untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik antara kedua negara;
4. Untuk memberikan bantuan timbal balik dan kerjasama untuk perlindungan, pelestarian, dan pemulihan warisan budaya dan sejarah, baik berwujud dan tidak berwujud, sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing negara, meningkatkan kerja sama untuk memerangi penjarahan, perdagangan ilegal dan penyelundupan benda budaya bergerak antara Indonesia dan Amerika Serikat;

5. Untuk bekerja sama dalam pemeliharaan, pelestarian dan pendidikan penggunaan arsip (arsip sejarah, naskah, dan film dokumenter), pertukaran dan kolaborasi dalam seni, film, media, dan pameran, serta bidang-bidang kerjasama yang disepakati bersama oleh para pihak, dalam rangka untuk mengenali warisan budaya di kedua negara;
6. Untuk mempromosikan orang ke kontak orang, think tank kerjasama, serta interaksi budaya, termasuk pertukaran pemuda, para ahli dan pertukaran peneliti, tukar resmi dan magang;
7. Untuk memperkuat kerjasama dalam keadaan darurat dan kesiapsiagaan bencana, bantuan, dan mengurangi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan manusia bencana dengan berkolaborasi pada solusi ilmiah yang inovatif, dan membangun masyarakat tangguh dan keselamatan warga meningkatkan melalui peningkatan kapasitas ditingkatkan, pertukaran informasi, dan pelatihan dalam keadaan darurat dan manajemen bencana;
8. Untuk bekerja sama dalam pencarian dan penyelamatan (SAR) kegiatan / jasa, yang meliputi pembangunan kapasitas, pertukaran informasi, latihan SAR gabungan dan operasi SAR bersama;
9. Untuk mengintensifkan kerjasama pendidikan untuk meningkatkan kualitas sekolah kurikulum dan pendidik, meningkatkan daya saing global, dan mempromosikan akses yang adil terhadap pendidikan;
10. Untuk meningkatkan kerja sama pendidikan dan kemitraan penelitian, termasuk beasiswa untuk pasca-sarjana derajat dan posting program

doktor, pertukaran siswa dan guru / dosen / ilmuwan, penelitian bersama, publikasi program gelar bersama, dan kemitraan universitas, dan pengakuan bersama atas gelar akademik dan sertifikat , serta meningkatkan pendidikan menengah di Indonesia;

11. Untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan beradaptasi pendidikan, termasuk teknis / kejuruan / pendidikan pelatihan keterampilan dengan mengembangkan program bantuan teknis di tingkat pendidikan menengah dan tinggi, dan untuk mempromosikan kewirausahaan;
12. Untuk mengembangkan kemitraan untuk membuat bagian teknologi informasi pendidikan setiap anak;
13. Untuk memperkuat kerjasama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, termasuk penelitian dan pengembangan proyek di daerah yang disepakati bersama, melalui pengembangan ilmu bilateral dan perjanjian teknologi dan Pusat *Excellence* Ilmiah berdasarkan kepentingan bersama dan saling menguntungkan;
14. Untuk mengejar kegiatan koperasi dalam aplikasi teknologi ruang angkasa, pendidikan dan penelitian untuk memajukan solusi untuk tantangan global termasuk manajemen bencana dan pemantauan perubahan iklim;
15. Untuk mengembangkan suatu kerangka luas untuk kerjasama kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit menular dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Setelah terbentuknya Komisi Bersama diketuai oleh Menteri Luar Negeri AS dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Komisi Bersama serta Kelompok Kerja adalah untuk membantu kedua negara dalam melaksanakan prioritas yang tercantum dalam Rencana Aksi dan dalam mengatasi tantangan bersama. Untuk memfasilitasi pekerjaan Komisi Bersama dalam menangani prioritas yang tercantum dalam Rencana Aksi, kami bermaksud untuk memperkuat kelompok kerja yang ada serta untuk membentuk kelompok kerja baru, yang mungkin saling menentukan, berdasarkan Rencana Aksi.

Kerjasama dalam bisnis dapat mempromosikan dua - arah investasi asing, merangsang inovasi melalui pertukaran teknis dan kerjasama, serta mendorong interaksi yang lebih besar antara masyarakat bisnis, kebijakan, dan masyarakat. Sebuah hubungan yang lebih kuat antara Negara Amerika dan Indonesia harus mencakup komponen berkembangnya bisnis dan kerjasama investasi (http://www.state.gov/p/eap/rls/ot/2010/147287.htm Diakses 11/05/2013).

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan sebuah desain atau rancangan yang berisi rumusan tentang objek yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif analisis kualitatif. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variable yang tersedia, maka peneliti hanya melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan The United State

Indonesia Society (USINDO) yang menjembatani kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat ataupun Pemerintah Amerika dan diimplementasikan dengan teori-teori dalam kajian Hubungan Internasional.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini akan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini mengasumsikan bahwa setiap kumpulan informasi tertulis dapat digunakan sebagai indikator sikap, nilai, dan maksud politik dengan cara menelaah secara sistematis menurut kriteria penafsiran kata dan pesan tertentu. Dengan demikian data-data yang digunakan adalah data-data sekunder yang berasal dari dokumentasi dan publikasi. Bentuk data-data tersebut dapat ditemui pada buku referensi, jurnal, majalah atau laporan dari instansi terkait, di samping pemanfaatan sumber-sumber tulisan lainnya seperti fasilitas dan jasa internet untuk mendapatkan data tertulis yang telah didokumentasikan.

Studi Kepustakaan, Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kepustakaan dengan menelaan teori, opini, membaca buku atau jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Penelusuran data online, peneliti dapat memanfaatkan data informasi berupa data maupun informasi teori, secepat dan semudah mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan layanan internet dengan cara mengakses alamat situs yang terkait

dengan kebutuhan penelitian karena, objek penelitian yang diamati merupakan suatu badan Internasional dan tidak membuka kantor perwakilan di Indonesia.

Metode Dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data atau fakta untuk memperoleh keterangan. Pelaksanaannya bisa secara langsung, bertatap muka (*face to face*) dengan orang yang akan diwawancarai atau bisa secara tidak langsung dengan memanfaatkan akses teknologi melalui telepon, internet dan sebagainya.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik Penentuan informan yang pakai peneliti adalah dengan menggunakan teknik penentuan *Purposive*. Yaitu peneliti menentukan pihak pihak informan berdasarkan tujuan, masalah dan variabel penelitian. Metode yang digunakan adalah metode wawancara sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Berkaitan dengan perdagangan investasi peneliti akan bertemu dengan narasumber dari Kementrian Perdagangan dan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) serta *The United State Indonesia Society* (USINDO) sebagai jembatan dalam perjanjian Comprehensive Partnership Amerika Serikat – Indonesia.

3.2.4 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik reduksi data. Artinya, data-data yang diperoleh, baik melalui studi pustaka, penelusuran online dan wawancara, digunakan sesuai dengan keperluan penelitan berdasarkan dengan tujuan penelitian. Hal ini bertujuan supaya data yang digunakan berkorelasi dengan perumusan masalah yang telah dibuat.

3.2.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai tempat di bawah ini sesuai dengan kebutuhan penelitian, diantaranya:

a. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia *(Embassy Of The United States in Indonesia)*

   Jl. Medan Merdeka Selatan, No. 3 - 5, Jakarta 10110

b. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

   JL. Pejambon, No.6, Jakarta 10110, 10110

c. *The United State Indonesia Society* (USINDO)

   Menara Thamrin, Lantai 14, Suite 1407

   Jl. MH. Thamrin Kav 3, Jakarta 10250

d. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

   Jl. M. I. Ridwan Rais, No. 5, Jakarta Pusat 10110

e. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190

f. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia

Jl. Dipati Ukur, Bandung

3.2.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu delapan bulan terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2013.

No	Kegiatan	Waktu Penelitian							
		2013							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt
1.	Pengajuan judul	■							
2.	Pembuatan usulan penelitian		■	■	■				
3.	Seminar usulan penelitian					■			
4.	Bimbingan skripsi	■	■	■	■	■	■	■	
5.	Pengumpulan data	■	■	■	■	■	■	■	
6.	Sidang								■